

Resistensi pemilih mahasiswa terhadap politik uang

Maya Mustika Kartika Sari ^{1, a *}, Mi'rojul Huda ^{2 b}, Warsono Warsono ^{3 c}

¹ Universitas Negeri Surabaya, Kebonsari Manunggal Tirta no 6, Surabaya, 60233, Indonesia

² Universitas Negeri Surabaya, Desa Pulorejo, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto, 61354, Indonesia

³ Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang Surabaya, 60231, Indonesia

^a mayamustika@unesa.ac.id*; ^b mirojuhuda@unesa.ac.id; ^c warsono@unesa.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Praktik politik uang mencederai esensi fairness dalam demokrasi. Hal itu dapat mendorong abnormalitas dalam demokrasi jika praktik politik uang diterima sebagai hal yang tidak keliru oleh para pemilih muda. Persepsi dan reaksi pemilih muda tentang politik uang dapat mewarnai pelaksanaan demokrasi dan politik negara yang berkeadilan. Studi ini mencoba untuk mengkaji praktik politik uang di kalangan mahasiswa pemilih muda di Surabaya dan resistensi mereka terhadap praktik politik uang. Kajian ini mencoba untuk mengisi kekosongan literatur mengenai resistensi politik uang dikalangan pemilih muda. Metode penelitian menggunakan dua tahap. Pertama, menggali respon pemilih muda tentang politik uang melalui diskusi kelompok terfokus. Kedua, secara spesifik menggunakan metode fenomenologi dengan berbagai pengalaman empiris serta kesadaran individu terkait berbagai tindakan serta respon terhadap praktik politik uang. Penelitian ini menemukan bahwa pemilih muda mahasiswa melakukan tindakan resistensi terhadap politik uang tetapi tidak dengan perlawanan nyata namun melakukan perlawanan diam. Perlawanan yang dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan tidak memilih dalam pemilihan sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap kontestan pemilihan dan tindakan yang lain yaitu melakukan tindakan kontra adaptif dengan menerima politik uang yang diberikan tetapi tidak memilih calon yang melakukan politik uang. Rasionalitas pemilih pemula dalam melakukan penolakan terhadap politik uang didorong oleh nilai baik politik namun kurang mampu dalam melakukan perlawanan mendorong terjadinya perlawanan diam.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilih Mahasiswa, Resistensi

How to Cite: Sari, M. M. K., Huda, M., & Warsono, W. (2023). University student voters' resistance to money politics. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.988>



Pendahuluan

Politik uang merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam setiap perhelatan Pemilu di Indonesia. Keberadaan politik uang seakan sudah menjadi tradisi dalam iklim demokrasi kita. Ada istilah *democracy for sale* dimana demokrasi biasa dilakukan dengan cara-cara transaksional (Aspinall & Berenschot, 2019). Tentu hal tersebut jauh dari substansi demokrasi, dimana demokrasi diharapkan bisa melahirkan para pemimpin yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Praktik politik uang juga menjadikan pemilu di Indonesia menjadi berbiaya tinggi. Kandidat yang bagus dan tidak memiliki modal, maka kecil kemungkinan akan bisa terpilih. Hal ini kemudian mendorong para calon untuk mencari sumber-sumber lain dari para pemilik modal.

Peralihan mekanisme Pilkada dari tidak langsung menjadi Pilkada langsung memunculkan dampak yaitu maraknya persebaran politik uang. Politik uang menjadi elemen penting kemenangan calon, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme Pilkada oleh DPRD menjadi Pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang, logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam Pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Sewaktu pemilihan kepala daerah oleh DPRD politik uang juga mengemuka namun dalam Pilkada secara langsung semakin meluas (Fitriyah, 2012). Faktor lain yang menyebabkan praktik politik uang tumbuh subur adalah tingkat perekonomian masyarakat yang masih buruk.

Riset dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan bahwa masyarakat bersifat permisif terhadap politik uang. Hal itu terkait dengan persepsi masyarakat bahwa politik uang

adalah rezeki yang tidak boleh ditolak (Salabi, 2020). Sikap permisif itu juga ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2019. Menurut LIPI, masyarakat menganggap bahwa politik uang serta pemberian adalah bagian dari kontestasi pemilu (Purnamasari, 2019). Sikap permisif terhadap praktik politik uang ternyata tidak diimbangi dengan komitmen masyarakat dalam memilih kandidat yang memberi. Sebagai contoh survey SPD menyebutkan bahwa 60% masyarakat di Indonesia menerima politik uang, dari 60% yang menerima, hanya 49% yang mempertimbangkan memilih calon yang memberi. Bahwa survey dari LIPI menunjukkan 40% masyarakat yang menerima politik uang tidak mempertimbangkan memilih calon yang memberi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih pragmatis dalam memandang politik uang.

Ada beberapa cara penyebaran politik uang: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran uang tunai dari “tim sukses” calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) “sumbangan wajib” yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya (Karim, 2020).

Pada Pilkada Jawa Timur tahun 2018, terdapat berbagai laporan mengenai adanya penggunaan politik uang selama masa kampanye maupun saat hari-H pemilihan. Diantara laporan tersebut berada di Kabupaten Bangkalan (2 laporan), Bojonegoro (3 laporan), dan Kabupaten Magetan (1 laporan) (Karim, 2020). Sayangnya semua laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan atau berhenti di Sentra Gakkumdu karena kurangnya bukti materiil maupun formil. Hal ini menandakan bahwa praktik-praktik politik uang masih akan menjadi salah satu strategi yang jitu bagi para calon. Disamping sangat efektif untuk menarik minat pemilih, juga tidak ada tindakan yang tegas bagi para pelanggarnya.

Harapan besar untuk mencegah munculnya praktik politik uang dalam pemilihan ada pada generasi Mahasiswa. Generasi Mahasiswa idealnya memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat politik uang. Mereka mungkin tidak akan tergiur dengan iming-iming uang tunai Rp. 25.000 – Rp. 50.000. Mereka juga tidak mempunyai banyak tanggungan seperti halnya generasi sebelumnya. Mereka juga tidak menjadi golongan warga miskin karena status mereka yang sebagian besar masih pelajar, mahasiswa yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebagai generasi Z yang paham teknologi dan melek literasi, mereka akan bisa dengan Mahasiswah mengakses berbagai sumber informasi termasuk profiling calon pemimpin mereka. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemilih Mahasiswa dalam melihat politik uang. Begitu juga dengan resistensi mereka dalam melihat politik uang. Resistensi tersebut seharusnya muncul pada generasi Mahasiswa sebagai generasi yang dianggap masih cukup idealis.

Gerakan-gerakan perlawanan terhadap politik uang dikalangan mahasiswa belum banyak diteliti. Bagaimana pola gerakan mereka, apa efek yang ditimbulkan dari gerakan tersebut, serta bagaimana respon dari sesama mahasiswa dalam melihat gerakan perlawanan politik uang. Salah satu gerakan terhadap politik uang adalah Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi (GPPD) yang melakukan kampanye serentak tolak hoaks dan politik uang di 19 Pilkada Jatim tahun 2020. Yang dimotori oleh Mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya (Azmi, 2020). Begitu juga dengan gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Kita Arek Surabaya (Karsa) yang melakukan deklarasi tolak politik uang di Pilwali Kota Surabaya tahun 2020 (Kurniawan, 2020). Meskipun dalam gerakan yang dilakukan bermuara untuk mendukung salah satu pasangan calon yang maju.

Prakti politik uang memunculkan dua reaksi yang berbeda di masyarakat. Pertama, adanya permisif atau penerimaan terhadap tindakan politik uang. Kedua, adanya penolakan atau resistensi yang muncul dari para mahasiswa. Penelitian ini akan fokus pada reaksi yang kedua yaitu resistensi terhadap politik uang dikalangan mahasiswa. Sejauh mana pola perlawanan mereka, seperti apa pola yang dilakukan, serta sejauh mana pemahaman mereka tentang gerakan yang dilakukan. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana pergolakan diinternal mahasiswa terkait

tidakkan politik uang. Selain melakukan perlawanan, apakah juga ada yang bersifat adaptif terhadap gerakan politik uang.

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana Pendekatan fenomenologi digunakan untuk meneliti, memeriksa, dan juga menganalisis kondisi empiris dari objek yang sedang diteliti. Fenomenologi berusaha untuk menggali makna dan konsep hidup seseorang dalam kerangka intersubjektivitas (Strauss, 2013). Pendekatan ini berasal dari kesadaran individu atas fenomena yang dialami secara langsung. Dalam kasus ini adalah para Mahasiswa dalam menghadapi fenomena politik uang dalam pilkada tahun 2020 dan juga melihat bagaimana sikap mereka terhadap praktik politik uang yang selama ini terjadi. Pendekatan ini mengharuskan penelitian ini untuk menyelidiki lebih dalam fenomena yang terjadi dan juga tingkah laku aktor yang terlibat. Sehingga membentuk suatu penelitian yang empiris dalam konteks yang nyata meskipun dalam objek penelitian yang diteliti terdapat batasan antara konteks dan fenomena yang bias.

Upaya untuk memotret fenomena politik uang pada para mahasiswa ini sangat penting dilakukan untuk melihat bagaimana pola relasi yang dihasilkan antara kandidat yang maju dengan para pemilih Mahasiswa. Apakah pola yang terbentuk membentuk pola patron-klien yang menjadikan pemilih Mahasiswa cenderung tunduk terhadap praktik politik uang, atau pola yang terbentuk adalah resistensi dengan kebedaraan politik uang. Sehingga muncul gerakan penolakan atau tindakan lain sebagai bentuk ekspresi penolakan seperti golput atau kampanye anti politik uang.

Penelitian ini menjangkit 115 responden dengan latar belakang pendidikan Mahasiswa di Kota Surabaya yang diberi pertanyaan terbuka melalui *google form* seputar politik uang. Dari 115 responden tersebut kemudian dipilih 11 orang untuk dilakukang FGD sebagai bentuk pendalaman isu melalui wawancara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Patronase dan Politik Uang

Istilah politik uang menjadi pembahasan yang cukup menarik dan cukup luas dalam studi ilmu politik maupun pemerintahan. Politik uang digambarkan dalam berbagai fenomena politik seperti penggunaan uang saat kampanye, suap di dalam pengambilan kebijakan di DPR, serta adanya jual beli nomor urut di partai politik. Hal tersebut menjadikan definisi politik uang menjadi sedikit kabur. Setiap orang bisa menggunakan istilah politik uang menurut definisinya masing-masing. Oleh karena itu tulisan ini menggunakan istilah yang dipakai oleh Aspinall (Aspinall, 2014) yaitu konsep patronase dan klientelisme dalam menggambarkan fenomena politik uang di Indonesia.

Merujuk pandangan Shefter dalam mendefinisikan patronase sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Definisi tersebut sangat jelas pemaknaannya, apapun yang didistribusikan oleh politisi (baik uang, barang, jasa) untuk mendapatkan dukungan suara. hal tersebut berlaku secara individu maupun kelompok. Hal-hal yang sifatnya abstrak seperti janji politik atau kontrak politik serta program yang akan dilakukan, tidak termasuk dalam katagori distribusi tersebut. Sedangkan istilah klientelisme merupakan pola relasi yang terbentuk atas dasar elektoral. Merujuk dari penjelasan Aspinall dan Sukmajati (2015) membagi menjadi tiga definisi. Pertama, kontingensi atau timbal balik pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus menerus. Pola relasi yang bersifat hierarkis serta berlangsung secara terus menerus tentu menggambarkan adanya kepentingan untuk melakukan upaya timbal balik. Upaya tersebut adalah untuk kepentingan dukungan politik elektoral. Istilah timbal balik tidak berlaku untuk kandidat yang memberi sesuatu kepada orang yang belum pernah dia temui atau tidak akan ditemui kembali (misalkan memberi di wilayah yang bukan menjadi dapil dia) sehingga tidak ada

upaya timbal balik yang akan dilakukan. Serta tidak ada tekanan dari klien karena mendapat sesuatu dari calon.

Politik uang dan patronase serta klientelisme adalah fenomena yang cukup akrab kita dengar dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan bahwa patronase dan politik uang dapat mempengaruhi preferensi pemilih sehingga pada gilirannya akan menguntungkan calon yang menggunakan strategi ini secara elektoral (Okthariza, 2019). Dalam pandangan Muhtadi menyebutkan bahwa ada dua hal besar yang dibahas dalam politik uang yaitu pertama, politik uang beroperasi pada ranah elit mulai Presiden, DPR RI sampai Bupati Walikota dimana mereka maju dalam pemilihan melalui kendaraan partai politik dan mengeluarkan banyak biaya untuk dapat maju. Kedua, politik uang di tingkat bawah dimana terdapat praktik jual beli suara dalam pemilihan. Hal ini juga terkait dengan dimensi politik uang dimana uang yang dikeluarkan bisa menghasilkan konversi suara yang efektif, serta berpengaruh signifikan terhadap kemenangan kandidat (Muhtadi, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati menyebut adanya penggunaan materi dalam bentuk uang maupun barang. Aspinall menyebut bahwa praktik politik uang masih mewarnai penyelenggaraan pemilihan umum di sejumlah negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Patronase dan klientelisme dianggap sebagai akar merebaknya politik uang di negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan patronase serta klientelisme dinilai sebagai produk sosial budaya dimana kelompok tertentu dan yang mempunyai keistimewaan memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan loyalitas pengikutnya. Patronase menggambarkan adanya suatu hubungan yang terpersonifikasi didasarkan pada loyalitas bersyarat dan transaksi manfaat timbal balik. Jika patronase lebih menggambarkan praktik transaksional yang bersifat materi, klientelisme lebih merujuk pada pola relasi antara kandidat dengan para elit politik, pemilih atau pendukung. Dalam klientelisme yang diandalkan adalah ikatan sosial dan juga agama (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Björkman (2013) menentang pandangan bahwa politik uang untuk “membeli suara”, menunjukkan perilaku negatif, hal tersebut harus dilihat dulu dalam konteks lokal. Uang pemilu untuk membayar biaya kampanye diibaratkan seperti membayar pekerja untuk menghadiri aksi unjuk rasa. Tidak hanya untuk mendukung tetapi juga bertujuan untuk menegaskan kembali kepercayaan dan mengurangi kemungkinan perubahan pilihan. Uang tunai juga bisa menjadi tanda kekuasaan dan otoritas: digunakan untuk menyimbolkan kemampuan untuk memberikan manfaat kepada konstituen.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Schafer dan juga Canare (Canare et al., 2018; Schaffer & Schedler, 2007) politik uang sangat Mahasiswah serta sangat efektif untuk menyasar masyarakat dengan penghasilan rendah. Meskipun kandidat tidak secara spesifik menarget masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjadi pemilih mereka. Tetapi efektifitas konversi suara dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah dianggap lebih efektif.

Kitschelt dan Wilkinson (2007) berpendapat bahwa kemaslahatan publik (*public goods*) yang diinginkan oleh semua orang di masyarakat dan dari yang kenikmatannya tidak seorang pun dapat dikecualikan. Menurut definisi tersebut maka suara pemilih tidak dapat diperdagangkan melalui pertukaran klientelis. Argumen seperti itu, menunjukkan pertukaran dalam praktik *money politics* bukanlah barang publik dalam pemahaman ekonomi. Sebagaimana didefinisikan oleh konsumsi non-rival dan *non-excludability*. Bahkan dalam demokrasi terkonsolidasi, kejujuran 'publik' dipolitisasi, 'ditargetkan' dan didistribusikan secara tidak merata. Dalam hal ini, 'kemurnian' dari kredensial kejujuran politik sebagai barang publik perlu dipertahankan secara cermat' (Loader & Walker, 2007).

Karakteristik Kritis dan Pelawanan Pemilih Mahasiswa

Pemilih Mahasiswa menjadi pembicaraan yang sangat menarik dalam konteks elektoral. Tidak hanya besarnya jumlah pemilih Mahasiswa yang mencapai 35-40% dari total pemilih berdasarkan data LIPI tahun 2019. Atau jumlahkan sekitar 85 juta dari 185 juta pemilih. Dampak partisipasi kaum Mahasiswa tentu menjadi daya tarik bagi siapapun yang berkepentingan di dalam pemilu. LIPI juga menyebutkan bahwa karakteristik generasi milenial cenderung rasional dan sadar akan partisipasinya (Abdi, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Esther

(2016) pemilih mahasiswa dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pemilih rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih dengan pertimbangan rasional dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yaitu pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yaitu pemilih yang baru mempunyai hak untuk memilih berdasarkan usia.

Kata kritis sangat erat kaitannya dengan reaksi atas hal yang tidak sesuai dengan idealisme. Mahasiswa yang kritis bisa dimaknai sebagai mahasiswa yang melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada. Dalam konteks penelitian ini, karakter mahasiswa dalam melawan tindakan politik uang dimaknai sebagai politik perlawanan. Tulisan ini akan melihat definisi politik perlawanan dari Lilja dan Foucault yang dianggap sangat cocok untuk menggambarkan kasus perlawanan terhadap politik uang.

Secara umum perlawanan adalah bentuk reaksi dalam kaitannya dengan kekuasaan. Hubungan dekat antara kekuasaan dan perlawanan kemudian menyiratkan bahwa perlawanan tidak hanya menantang atau memprovokasi kekuasaan, tetapi terkadang berakhir dengan dukungan terhadap kekuasaan (Lilja, 2022). Umumnya orang yang melakukan perlawanan atau berani berbeda dari yang lain, dicap sebagai orang yang menyimpang karena menyalahi tata aturan atau tata norma yang ada. Mereka akan didefinisikan sebagai orang yang nyeleneh (*abnormal*). Hal ini berarti bahwa bentuk-bentuk resistensi tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan menurut Lilja, resistensi tersebut bisa menjadikan adanya konsolidasi relasi kekuasaan (*turn out to consolidate the power relation that is at stake*). Secara lebih dalam Foucault menjelaskan relasi kuasa dan juga resistensi dalam sebuah benang panjang yang terhubung satu sama lain, menarik dan menyebarkan satu sama lain, tetapi menemukan basis dukungan mereka di tempat yang lain, serta membentuk sistem yang komprehensif. Dimana ada kekuatan, di sana ada perlawanan. Keberadaan kekuasaan tergantung pada seberapa banyak titik-titik perlawanan ini memainkan perannya. Peran disini diartikan sebagai musuh, target, dukungan, atau kunci dalam relasi kuasa (Foucault, 1990).

Pada kasus perlawanan terhadap tindakan politik uang tersebut, apakah para mahasiswa menyadari arti perlawanannya?, apakah mereka juga berfikir jauh dalam melakukan perlawanan tersebut?, dan apa implikasi yang ditimbulkan dari perlawanan yang mereka lakukan?. Dalam pandangan van Klinken (2007) terkait gerakan sosial, gerakan sosial harus menunjukkan sedikitnya tiga poros dari lima poros agar bisa dianggap sebagai gerakan sosial. Kelima poros tersebut yaitu: (1) tindakan kolektif atau gabungan. (2) tindakan atau klaim yang berorientasi pada perubahan. (3) sesuatu tindakan kolektif yang bersifat ekstra-institusional atau non institusional. (4) organisasi sampai tingkat tertentu. (5) keberlanjutan dalam hal waktu sampai tingkat tertentu (van Klinken, 2007).

Berdasarkan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Pada pasal 19 disebutkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga negara Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin. Sedangkan definisi pemuda dalam UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa usia dari pemuda adalah antara 16-30 tahun. Dalam hal ini pemuda tidak hanya pemilih pemula saja, tetapi juga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sampai usia 30 tahun.

Penguatan "warga kritis" yang seringkali ditemui pada warga yang lebih Mahasiswa dan berpendidikan tinggi (Norris, 1999) yang mendukung nilai-nilai demokrasi tetapi sangat kritis terhadap sistem pemerintahan demokrasi, telah berkontribusi terhadap tumbuhnya sinisme terhadap politik konvensional belakangan ini. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kekecewaan terhadap kinerja dan motif pemerintah, partai politik dan politisi pada umumnya (Spanning, 2008). Serta lintasan yang umumnya menurun dalam keanggotaan partai (Norris, 1999), keterikatan partai dan kepercayaan politik terus melemah di negara demokrasi (Dalton, 2004).

Dalam perspektif ini, pencapaian pendidikan tinggi akan dikaitkan dengan ketidakpercayaan politik, sebagai "warga negara yang kritis" lebih cenderung mengamati kinerja aktor politik dan lebih sensitif terhadap hasil disfungsi yang terkait dengan sistem politik yang lebih luas. Hal ini menyebabkan langsung hubungan antara ketidakpercayaan politik dan partisipasi dalam politik non-pemilihan. Keterasingan dari politik konvensional dan kurangnya kepercayaan pada

institusi politik tradisional telah diidentifikasi sebagai faktor penyumbang potensial dalam kebangkitan dan proliferasi protes pemuda di seluruh Eropa pada saat penghematan dan penghematan kesejahteraan (Sloam, 2013). Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk mengharapkan bahwa kaum Mahasiswa yang tidak percaya pada politik konvensional dan politisi pada umumnya, akan lebih cenderung mengekspresikan keprihatinan dan keluhan mereka melalui bentuk partisipasi politik non-pemilihan. Memang, Kaase (1999) menemukan bahwa kepercayaan politik yang lebih rendah dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan langsung di dalam konteks Eropa.

Sensivitas Pemilih Mahasiswa terhadap Politik Uang

Praktik politik uang merupakan fenomena yang seringkali dipahami berdasarkan perspektif individual berdasarkan referensi dan preferensi nilai sosial yang diyakini oleh individu. Referensi dan preferensi nilai tersebut, memberikan dorongan terhadap individu untuk memberikan respon terhadap fenomena praktik politik uang.

Resistensi adalah situasi menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Untuk menentukan posisi atau reposisi, maka dipengaruhi oleh dua aspek yaitu fenomena politik uang sebagai fenomena eksternal bagi pemilih Mahasiswa dan konstruksi berpikir pemilih Mahasiswa sebagai faktor internal. Selain faktor eksternal dan internal itu, perlu situasi yang menyelaraskan kedua faktor tersebut. Terdapat pengetahuan politik biasanya diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek tentang pengetahuan politik uang secara faktual. Dalam hal ini, pemilih Mahasiswa mengidentifikasi alternatif pilihan tentang realitas politik mana yang paling sesuai dengan keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Untuk menangkap bentuk penting dari resistensi politik ini, dapat mengkaji situasi tersebut yang mendorong sensitivitas pemilih Mahasiswa tentang politik.

Diketahui, konteks politik uang yang dikemukakan pemilih Mahasiswa bervariasi dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota, hingga Lembaga legislatif dan Presiden. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan fokus penelitian. Beberapa informasi justru dapat menguatkan bahwa politik uang justru lebih semarak pada kontestasi di tingkat

Pergeseran bertahap dari politik yang oligarki terbuka merupakan tantangan signifikan bagi demokrasi di Indonesia. Konflik kepentingan antara tuntutan jabatan publik dan kepentingan pribadi mereka tampaknya sulit dihindari bagi politisi yang juga menjalankan kerajaan bisnis besar dan memiliki modal. Di sisi lain, bagi partai politik dan kandidat politik terdorong untuk maju dan membela jabatan publik secara pribadi dan perilaku serta keputusan mereka lebih tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas publik. Situasi ini direspon beragam oleh pemilih Mahasiswa, Kerangka berpikir pemilih Mahasiswa yang condong reaktif non konfirmatif mendorong gaya respon yang kurang taktis dan produktif. Hal tersebut tampak dari tanggapan umum pemilih Mahasiswa tentang politik uang. Dalam hal tersebut dapat digambarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pandangan Umum Pemilih Mahasiswa tentang Politik Uang

No.	Deskripsi tentang Politik Uang	Respon	
		Jumlah	%
1.	Pemberian suap berupa uang kepada seseorang untuk suatu kepentingan tertentu	63	54,78
2.	Memberi uang dengan maksud Jual Beli	25	21,74
3.	Praktik politik uang merupakan sarana "negatif" untuk menarik simpati publik agar memilih kandidat tertentu menjelang pemilihan.	27	23,48
Total		115	100

Tabel 1 menunjukkan bahwa orientasi pengetahuan pemilih mahasiswa terhadap politik uang mengarah pada persepsi bahwa politik uang adalah tindakan suap. Meskipun demikian persepsi 1 dan 2 bukan merupakan deskripsi politik uang yang dirujuk dalam undang-undang pemilu. Asumsi yang dibangun dalam kerangka umum tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka yang lebih spesifik berikut ini. Uraian yang mendasar tentang penggalan pemilih Mahasiswa dalam merespon peristiwa yang pernah mereka alami.

Dalam kerangka awal pemilih mahasiswa merasa bahwa politik uang adalah merupakan situasi yang tidak dirasakan nyaman. Karena idealisme mereka mengenai demokrasi yang bersih dan

bebas dari praktik-praktik kecurangan serta tindakan politik uang. Situasi yang terjadi dalam konteks kehidupan informan diinterpretasi secara normatif logis, dengan mengkerangkakan pendapat dan pandangan mereka dalam satiran situasi yang mengemukakannya sebagai realitas yang "lucu" terhadap apa yang mereka lihat. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabila berikut:

"Lucu. Bisa-bisanya orang memilih pemimpinnya dengan takaran berapa uang yang diberikan. Kebanyakan semua orang tidak tahu, khususnya masyarakat desa atau orang berpendidikan rendah, bahwa dengan *money politic* para pejabat akan tidak segan untuk berbuat korupsi untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan dia untuk kampanye kepada masyarakat. Memang seharusnya diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang politik uang. Kebanyakan dari mereka tidak tahu dari akibat politik uang tersebut"

Hal tersebut menunjukkan adanya konteks kegelisahan terhadap implikasi politik uang, Namun sayangnya, para pemilih mahasiswa jarang dan tidak pernah melakukan diskusi intensif berkaitan dengan isu politik uang karena mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang secara factual tidak dapat terjangkau. Sifat apatis dan permisif tersebut menjadikan mahasiswa sadar akan dampak dari politik uang terhadap kualitas demokrasi tetapi cenderung lebih pasif dalam merespon adanya politik uang disekitar mereka.

Pemikiran ketidakterjangkauan para pemilih mahasiswa dalam menggali lebih intens tentang politik uang, didasarkan pada pandangan faktual yang meliputi persepsi dan konstruksi mereka. Sebagian banyak menguraikan pemikiran logis tentang politik uang sebagai realitas yang sulit untuk ditentang. Hal tersebut terungkap dalam narasi berikut ini.

"kondisi praktik politik uang di Indonesia menurut saya masih sangat banyak terjadi dan seolah menjadi budaya yang dianggap lumrah atau wajar terjadi, terutama di kawasan desa-desa yang dominan warganya dari kalangan masyarakat kebawah secara finansial sehingga dengan adanya politik uang ini menjadi momentum yang disambut dengan baik oleh masyarakat"

Pandangan tersebut disimpulkan hampir oleh seluruh informan. Hal ini selaras dengan anggapan umum yang dianut khalayak luas. Bahkan pengalaman bersama keluarga pun mendorong untuk perilaku yang permisif meskipun tidak adaptif. Proses sosialisasi politik uang sudah dialami sejak kanak-kanak. Hal tersebut mendorong terjadinya falsifikasi dalam konstruksi pengetahuan mereka sebagai akibat dari situasi paradok yang dialami.

Jaringan Broker Keluarga

Para pemilih mahasiswa mengalami sebuah fase kebingungan saat mereka mempunyai hak pilih untuk pertama kali. Pada satu sisi, mereka sangat antusias menyambut datangnya pemilihan baik itu pilkades, maupun pilkada. Pada sisi yang lain mereka harus menerima kenyataan bahwa gelaran pilkada maupun pilkada dilaksanakan dengan tidak jujur dengan adanya praktik-praktik politik uang. Sebagaimana besar dari mereka melihat secara langsung praktik tersebut. Mereka melihat dan mendengar di depan mata mereka ada uang atau barang yang dibagikan untuk memenangkan calon tertentu. Beberapa mahasiswa melihat hal tersebut langsung dari keluarga inti mereka. Ada yang orang tua mereka berperan sebagai timses, atau saudara mereka yang bertugas sebagai broker untuk mencari massa dan digiring ke TPS.

Jaringan broker memang menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan kesuksesan politik uang (*vote buying*). Karena mereka adalah ujung tombak dalam menggalang suara di lapangan. Jaringan broker ini berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Desa, sampai tingkat TPS. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, satu orang broker pada level TPS bertugas untuk mencari 10-20 orang pemilih. Tugas broker ini adalah memastikan bahwa orang-orang yang menjadi target tersebut menggunakan hak suaranya dan memilih calon yang menyuruh mereka. Para broker pada level TPS direkrut oleh broker pada level desa atau dusun, dan broker level desa dan dusun direkrut oleh broker level Kecamatan. Begitulah jaringan tersebut berjalan.

Loyalitas dan integritas para broker akan menjadi kunci kesuksesan seorang calon. Karena tugas broker selain memetakan calon pemilih, juga sebagai eksekutor di lapangan dalam membagikan uang ke calon pemilih. Nominal pemberian berupa uang yang diterima oleh para mahasiswa rata-rata berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 100.000, meskipun juga ada yang mengaku menerima lebih dari nominal tersebut. tidak hanya berupa uang tunai, beberapa calon juga memberi

dalam bentuk barang seperti kaos, sembako, dan juga sarung. Untuk kasus tertentu nominal politik uang bisa sangat tidak masuk akal. Sebagai contoh di salah satu Kabupaten di Jawa Timur, untuk even pemilihan kepala desa, seorang kades bisa membagi nominal uang yang cukup besar untuk mendapatkan suara. Biasanya hal itu terjadi karena desa tersebut memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar. Selain itu adanya prestige apabila menjabat sebagai kepala desa.

Broker pada level TPS akan lebih Mahasiswah mengajak orang-orang yang sudah dikenal seperti anak, suami/istri, saudara, atau teman. Beberapa informan mengaku bahwa keluarga mereka merupakan timses seorang calon yang bertugas membagi uang (broker). Dan para mahasiswa tersebut diajak oleh keluarga mereka untuk memilih calon yang didukung. Akan sangat sulit menolak politik uang apabila ajakan tersebut berasal dari orang tua sendiri atau keluarga dekat. Apabila ajakan tersebut dari orang diluar keluarga inti, akan lebih Mahasiswah untuk menolaknya.

Salah satu metode verifikasi pemilih dari para calon adalah mendata calon pemilih dari DPT yang sudah ditetapkan. Setelah itu melakukan ajakan dengan cara meminta KTP serta KK dan nomor HP/ WA untuk kemudian didata sebagai salah satu pemilih calon tertentu.

Perlawanan Diam Pemilih Mahasiswa terhadap Politik Uang

Sensitivitas pemilih Mahasiswa dalam merespon fenomena praktik politik uang, mendorong pilihan-pilihan sikap mereka dalam melakukan perlawanan terhadap politik uang bersifat personal dan parsial sesuai dengan keyakinan mereka pada saat itu. Ketidakpercayaan kepada mekanisme sistem politik mendorong perilaku Golput (tidak memilih dalam kesempatan memilih/ Memilih tidak sah).

Setting situasi yang terjadi dimana persepsi politik uang diceritakan salah seorang informan, dimana memiliki pengalaman dalam politik uang dimana ia diminta KTP untuk didata tanpa ada kejelasan mengenai tujuan sebenarnya dari pendataan tersebut. baru disadari ketika tim yang mendata tersebut memberikan uang dengan sedikit memaksa untuk memilih calon tertentu. Pengalaman tersebut memupus apresiasi pemilih Mahasiswa tentang politik dan mekanisme demokrasi. Hal tersebut mendorong informan memaknai fakta-fakta lainnya dengan cara pandang yang cenderung berulang.

Pada akhirnya beberapa pemilih mahasiswa memantapkan pilihan penolakannya terhadap politik uang dengan cara menolah memilih dalam ajang kontestasi pemilu. Tentu banyak faktor untuk melihat secara detail perilaku golput, tetapi melihat tren angka *undecided voters* serta angka golput yang tinggi pada kalangan muda, tentu hal tersebut sangat wajar apabila melihat lebih dalam apa yang dialami oleh pemilih muda khususnya pemilih mahasiswa.

Cara berbeda dipilih oleh mahasiswa dalam melihat kandidat yang melakukan politik uang, dimana ia menerima uang dari para kandidat tetapi tidak memilih calon tersebut. hal ini tentu sangat pragmatis dan paradok, namun hal tersebut dilakukan karena terdapat “keyakinan” lain tentang politik yang dipegang sebagai sebuah kebenaran. Saat realitas politik yang ditemui adalah realitas yang paradok, pemilih Mahasiswa mengambil tindakan sebagai pilihan tindakan yang dipandang rasional.

Refleksi yang dilakukan pemilih Mahasiswa dalam mengejawantahkan pengetahuan dan keyakinannya dalam tindakan-tindakan politik selaras dengan pandangan digunakan dalam Gunn (2014); dan Winters (2011) tentang oligarkhi politik. Untuk oligarki didefinisikan sebagai masyarakat yang menampilkan perpaduan sistematis kekuatan politik dan ekonomi di dalam individu yang sama atau kelompok elit kecil dari individu semacam itu dengan cara yang tidak tersembunyi tetapi terlihat, diterima atau setidaknya ditoleransi, dan karenanya dianggap kurang lebih sah. Oligarki dapat dan memang memengaruhi tidak hanya politik saja tetapi juga peradilan, militer, dan masyarakat sipil.

Terdapat problem mendasar dalam budaya politik di Indonesia yaitu adanya praktik politik uang. Problem tersebut karena adanya relasi parton-klien yang kuat antara elit (parpol, calon eksekutif dan legislatif) dan pemilih. pola relasi tersebut bejalan secara hierarkis dan asimetris sehingga mereduksi nilai-nilai konstituensi dalam proses demokrasi kita.

Sebagaimana diungkapkan oleh Lipset, bahwa demokrasi sangat mungkin berkembang pada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan serta ekonomi yang merata. Akar masalah utama dari relasi patron-clien yang kemudian menimbulkan efek politik uang adalah adanya kesen-

jangan pada bidang pendidikan dan juga ekonomi di masyarakat kita. Hal ini menjadikan literasi politik masyarakat masih sangat kurang. Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik, cenderung akan lebih rasional dalam memandang persoalan politik uang. Mereka idealnya tidak akan tergoda untuk memilih calon dengan embel-embel uang Rp. 25.000 misalnya. Mereka juga melek teknologi sehingga akan dengan Mahasiswa melakukan cek dan juga tracking rekam jejak calon-calon anggota eksekutif dan juga legislatif yang berterbaran di depan mereka. Generasi muda merupakan kelompok strategis yang memiliki idealisme serta pendidikan literasi politik yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka memiliki pilihan dalam mewarnai proses politik yang selama ini bersifat transaksional. Mereka bisa saja abai dan apatis terhadap kondisi politik saat ini dan memilih untuk golput dalam setiap perhelatan pemilu. Atau mereka juga bisa membuat gerakan-gerakan untuk menolak politik uang dan juga menghilangkan budaya patron-clien yang selama ini sudah menjadi budaya dalam sistem politik kita. Atau mereka menjadi adaptif dengan fenomena politik uang yang terjadi, mereka tidak resisten serta mampu beradaptasi dengan keberadaan politik uang.

Simpulan

Pemilih Mahasiswa masih mengalami situasi yang ambigu dalam mencermati situasi yang mereka definisikan sebagai politik uang. Disatu sisi Politik uang dipahami sebagai pengingkaran terhadap norma-norma keadilan, namun jika disetarakan dengan konteks situasi sosial adalah merupakan kelaziman yang dapat ditemui sehari-hari. Hal tersebut mendorong pertumbuhan sensitivitas terhadap politik uang tidak selaras dengan fenomena aksi yang ditampilkan oleh pemilih Mahasiswa. Secara faktual, kerisauan yang dirasakan oleh pemilih Mahasiswa tentang praktik politik uang tidak ditindaklanjuti dengan konfirmasi tindakan/aksi positif ko-lektif. Respon yang ditunjukkan masih pada intepretasi personal-individual tanpa mengafirmasi pandangan dan tindakan rekan lain. Hal tersebut berimplikasi pada mekanisme perlawanan pemilih Mahasiswa terhadap praktik politik uang. Respon perlawanan dilaksanakan pemilih Mahasiswa berupa tindakan: (1) Tidak memilih kadidasi manapun pada saat ajang kontestasi politik. (2) Menerima politik uang namun menolak mengikuti kesepakatan. Resistensi yang dilakukan pemilih Mahasiswa dengan melakukan tindakan kontra namun adaptif. Hal tersebut dapat diasosiasikan bahwa pemilih Mahasiswa belum menunjukkan potensi politik uang dalam mendorong praktik korupsi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik politik uang di Indonesia memerlukan solusi yang holistik serta berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: **Pertama**, memperkuat peran partai politik sebagai filter utama untuk memilih calon-calon pemimpin yang berintegritas. Serta mendorong partai politik untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye dan pengelolaan keuangan partai; **Kedua**, membuat penyelenggaraan pemilu yang *free and fair* dengan cara memperkuat integritas lembaga penyelenggara pemilu serta lembaga pengawas pemilu. **Ketiga**, menjadikan kampus sebagai lembaga independen yang mampu untuk memberikan inovasi kebijakan serta teknologi untuk meminimalisir praktik politik uang serta kecurangan pemilu. Keempat, mendorong peran serta aktif masyarakat dengan terus memberikan edukasi mengenai nilai-nilai demokrasi, partisipasi, serta nilai anti korupsi.

Referensi

- Abdi, A. P. (2018). *Hasil survei LIPI: 40 persen suara di Pemilu didominasi milenial*. Tirto.
<https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada*

- pemilu legislatif 2014*. Research Centre for Politics and Government.
- Azmi, F. (2020). *Gerakan millenial kompak tolak hoaks dan politik uang di 19 Pilkada Jatim*. Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5286069/gerakan-millenial-kompak-tolak-hoaks-dan-politik-uang-di-19-pilkada-jatim>
- Björkman, L. (2013). "you can't buy a vote": cash and community in a Mumbai election.
- Canare, T. A., Mendoza, R. U., & Lopez, M. A. (2018). An empirical analysis of vote buying among the poor: Evidence from elections in the Philippines. *South East Asia Research*, 26(1), 58–84. [https://doi.org/An empirical analysis of vote buying among the poor: Evidence from elections in the Philippines](https://doi.org/An%20empirical%20analysis%20of%20vote%20buying%20among%20the%20poor%3A%20Evidence%20from%20elections%20in%20the%20Philippines)
- Dalton, R. J. (2004). *Democratic challenges, democratic choices: The erosion of political support in advanced industrial democracies*.
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5–14. <https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>
- Foucault, M. (1990). *The history of sexuality, Vol 1: An introduction* (Robert Hurley (trans) (ed.)). Vintage.
- Gunn, P. (2014). Democracy and epistocracy. *Critical Review*, 26(1–2), 59–79. <https://doi.org/10.1080/08913811.2014.907041>
- Kaase, M. (1999). Interpersonal trust, political trust and non-institutionalised political participation in Western Europe. *West European Politics*, 22(3), 1–21. <https://doi.org/10.1080/01402389908425313>
- Karim, A. G. (2020). *Menegosiasi ulang Indonesia*. IRCiSoD.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). Citizen-politician linkages: an introduction. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, 2007*, 1–49.
- Kurniawan, D. (2020). *Komunitas kita Arek Surabaya deklarasi tolak politik uang pada Pilkada Surabaya 2020*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4426845/komunitas-kita-arek-surabaya-deklarasi-tolak-politik-uang-pada-pilkada-surabaya-2020>
- Lilja, M. (2022). The definition of resistance. *Journal of Political Power*, 15(2), 202–220. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2022.2061127>
- Loader, I., & Walker, N. (2007). *Civilizing security*. Cambridge University Press.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Springer Nature.
- Norris, P. (1999). *Critical citizens: Global support for democratic government*. OUP Oxford.
- Okthariza, N. (2019). Petahana, patronase, dan politik uang di Jawa. *Centre for Strategic and International Studies*, 1–10.
- Purnamasari, D. M. (2019). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Kompas.Com.
- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku pemilih pemula dalam pilkada serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 25. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.148>
- Salabi, A. (2020). *Orang kuat daerah dan dinasti politik di pilkada paslon tunggal*. Rumah Pemilu.
- Schaffer, F. C., & Schedler, A. (2007). What is vote buying. In *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying* (pp. 17–30). Lynne Rienner Boulder, CO.
- Sloam, J. (2013). 'Voice and equality': Young people's politics in the European Union. *West European Politics*, 36(4), 836–858.
- Strauss, A. (2013). *Dasar-dasar penelitian kualitatif: tatalangkah dan teknik-teknik teoritisasi data*.
- van Klinken, G. A. (2007). *Perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.